

**Editor in Chief**

Drs. RaswanUdjang, M.Si

**Managing Editor**

TututDewiAstuti S.E., M.Si.,Ak., CA., CTA

**Editorial Board**

Prof. Dr. Indra Bastian, MBA, CMA., Akt (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)  
Dr. Greg Shailer, BCom., MCom., FCPA. (The Australian National University Canberra)  
Dr. Harun Harun, M.Acc, CA (University of Canberra)  
Dr. Sri Suryaningsum, MS.i, Ak, CA (Universitas Pembangunan Nasional Veteran)  
Wisnu Haryo Pramudya, SE, M.Si, Ak, CA (Akademi Akuntansi YKPN)  
Tutut Dewi Astuti, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)  
Rochmad Bayu Utomo, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)  
Nugraeni, SE, M.Sc (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)  
Endang Sri Utami, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)  
Hasim As'ari, SE, MM (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)  
M. Budiantara, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)  
Mushawir, M.Si (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)  
Zaenal Wafa, ST, M.Kom (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

**Asistan Editor**

Drs. Sumarsam

DwiRusniwati

**ALAMAT REDAKSI**

Pusat Pengembangan Akuntansi  
Universitas Mercu Buana Yogyakarta  
Jalan Wates km. 10  
Yogyakarta 55753  
Telpon (0274) 6498212 pesawat 145  
Fax (0274) 6498213

<http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id>

Email: [jurnal.umby@gmail.com](mailto:jurnal.umby@gmail.com)

Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB) diterbitkan oleh Unit Publikasi Ilmiah & HaKI Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan hasil penelitian antara staf pengajar, alumni, mahasiswa.  
JRAMB terbit dua kali setahun.  
Redaksi menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan. Pedoman penulisan naskah untuk JRAMB tercantum pada bagian akhir jurnal ini.  
Surat-menyurat mengenai artikel yang akan diterbitkan, langganan, keagenan dll, dialamatkan langsung ke alamat redaksi.



**JURNAL RISET AKUNTANSI MERCU BUANA (JRAMB)**  
**Pusat Pengembangan Akuntansi**  
**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

Sekretariat: Jalan Wates Km. 10 Yogyakarta,  
telpon (0274) 6498212 pesawat 144  
email: jurnal.umby@gmail.com  
web: www.mercubuana-yogya.ac.id

---

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Edisi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga jurnal edisi pertama ini akhirnya dapat diterbitkan.

Redaksi menyadari bahwa jurnal edisi pertama ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya jurnal ini.

Semoga jurnal ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, 30 Mei 2016  
Redaksi

## DAFTAR ISI

Anggota Redaksi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>Analisa Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada Industri Farmasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)</b>	
Annisa Faktkhul Jannah.....	1 - 20
<b>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta (Studi Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Atas Lkpd Yogyakarta Tahun 2010-2014 Khususnya Laporan Realisasi Anggaran)</b>	
Aristyan Jeffri Nugroho, Martinus Budiantara .....	21 – 34
<b>Model Prediksi Kepemilikan Manajerial Dengan Teknik Analisis Multinomial Logistik</b>	
Triska Dewi Pramitasari, Isti Fadah, Hadi Paramu .....	35 - 58
<b>Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (Sim)</b>	
Gressi Hariyanti .....	59 – 81
<b>Analisa Kerugian Negara Dengan Penerapan Audit Investigasi Pada Indikasi Kecurangan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten X Dengan Analisis <i>Fraud Triangle</i></b>	
Ifnatul Khasanah.....	82 – 104
<b>Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening</b>	
Manggar WUlan Kumala.....	105 – 118
<b>Faktor Penentu Ketepatan Waktu <i>Corporate Internet Reporting</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei</b>	
V.Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami .....	119 – 137
<b>Pedoman Penulisan Naskah .....</b>	120

## PENGARUH DAU DAN PAD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

**Manggar Wulan Kusuma**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
manggarwulan@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan variabel belanja modal sebagai variabel intervening. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal; 2) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal; 3) Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Kata Kunci: DAU, PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

## **THE EFFECT OF DAU AND PAD TOWARDS ECONOMIC GROWTH USING CAPITAL EXPENDITURE AS INTERVENING VARIABLE**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the general allocation funds and local revenue can affect economic growth in South Sulawesi Province by using capital expenditure as an intervening variable. The data source used is secondary data in the form of financial report of local government of regency/city in South Sulawesi Province in 2006 until 2013. Data analysis technique used is Partial Least Square (PLS) analysis. The result of the research shows that 1) General allocation fund has negative effect to capital expenditure; 2) Original revenue of the region has a positive effect on capital expenditure; 3) Capital expenditure negatively affects economic growth.*

*Keywords: DAU, PAD, Capital Expenditure, Economic Growth*

### **PENDAHULUAN**

Berlakunya Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004 menandai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintahan daerah, baik dalam pengalihan maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai

potensi yang dimiliki. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola pemerintahan dan keuangan daerahnya sendiri. Dengan adanya kewenangan otonomi yang lebih luas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya secara merata, adil, dan berkesinambungan.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat berupa dana perimbangan merupakan sumber penerimaan tambahan bagi pemerintah daerah. Fisher (1996) berpendapat bahwa transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dengan bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah dan anggaran daerah yang semakin besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu digali sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari daerah itu sendiri dan bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan utama

pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari kemandirian daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu jelaslah bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan daerah. PAD menjadi sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah akan meningkatkan pembangunan daerah dengan cara memperbaiki atau menambah fasilitas umum bagi masyarakat. Belanja infrastruktur termasuk dalam bagian belanja modal pemerintah, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Saragih (2003) juga berpendapat bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal dilakukan untuk melakukan aktivitas pembangunan. Tanggungjawab pemerintah kepada prinsipal adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah.

Selain Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daya tarik wisata tersendiri bagi para wisatawan. Beberapa tahun terakhir, banyak wisatawan yang sudah ramai mengunjungi Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Selayar yang memiliki keindahan wisata alamnya, memikat para wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal. Selain itu, Kota Makassar juga merupakan daerah wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kabupaten Tanah Toraja yang kaya akan budaya juga berhasil memikat para wisatawan. Dengan meningkatnya pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan, pendapatan asli daerah di provinsi ini pasti akan meningkat. Perekonomian masyarakatnya juga mulai meningkat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan alasan inilah, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening.

Eisenhardt (1989) mengatakan bahwa dalam penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan suatu organisasi berkaitan dengan teori keagenan. Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, sosiologi dan teori organisasi. Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain (Stiglitz, 1987). Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia berpendapat bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal dan agen (Lane, 2003). Lane (2003) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Di dalam pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan prinsipal-agen yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran antara: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan.

Menurut Halim (2002), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa DAU memiliki jumlah yang sangat signifikan

sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, DAU dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebagian pengendalian yang lebih besar terhadap keuangan negara. Tujuan DAU adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Dana transfer ini sangat efektif digunakan sebagai sarana mencapai sasaran di berbagai sektor tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Kebijakan perimbangan keuangan mempunyai implikasi terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, khususnya karena kebijakan pembagian penerimaan sumber daya alam yang hanya diperoleh oleh beberapa daerah. Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya. Menurut Peraturan Pemerintah No.104 Th.2000 Pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. DAU diberikan Pemerintah untuk mengatasi masalah horizontal imbalance, yaitu untuk menjamin keseimbangan sumber-sumber alokasi antar

unit-unit pemerintah pada tingkat pemerintah yang sama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD.

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset

(Permendagri 13 Tahun 2006). Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordriawan, 2006). Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-Lain pendapatan yang sah yaitu: Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Secara teori, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro: 2006). Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Teori Pertumbuhan Ekonomi Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk bisa menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya (Djojohadikusumo, 1994:53). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat

### **Pengembangan Hipotesis**

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber

daya yang dimilikinya sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat. Menurut Sidik (2002), berdasarkan hasil dari penelitiannya di beberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU daripada Pendapatan Asli Daerah. Dengan memberikan Dana Alokasi Umum pada pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap Dana Alokasi Umum tersebut bisa dialokasikan secara bijak oleh pemerintah daerah karena tidak selamanya Pemerintah Pusat bisa mengawasi kinerja pemerintah daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip teori keagenan yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989), bahwa sebenarnya sulit bagi pihak prinsipal yaitu pemerintah pusat untuk memverifikasi apa yang dilakukan pihak agen yaitu Pemerintah Daerah sudah tepat atau belum. Selain itu, Menurut *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Putro (2009) menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan secara terhadap variabel belanja modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Pendapat ini

makin diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et al (1985) yang membuktikan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis pertama yaitu:

**H1: Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal**

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari – harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Bila hal ini disesuaikan dengan Teori Keagenan, hubungan kontraktual antara pihak agen yaitu masyarakat dan pihak prinsipal yaitu pemerintah daerah dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut melalui alokasi belanja modal. Jika pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang lebih banyak dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk membiayai belanja modalnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang

signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yaitu secara signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Aprizay et.al (2014) juga membuktikan bahwa jika suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang banyak maka bisa untuk mendanai belanja modal daerahnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis kedua yaitu:

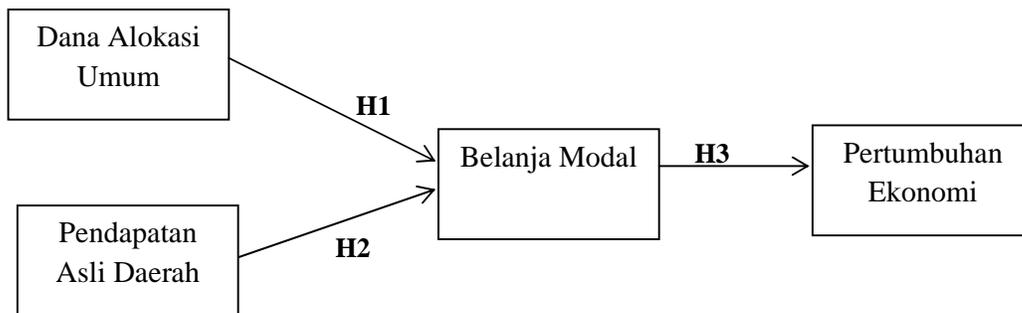
**H2: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dicapai jika pemerintah daerahnya bijak dalam mengatur keuangan daerahnya. Menurut Kuncoro (2004), pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki sarana dan prasarana yang baik, maka bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan aman dan nyaman, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jika Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan pemasukan daerahnya ke belanja modal secara efektif, maka harapannya belanja modal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Lin dan Liu (2000) berpendapat bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) yaitu belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Hakim (2013) dan Saragih (2003) masing-masing penelitiannya menunjukkan bahwa

sebenarnya belanja modal memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun hipotesis ketiga yaitu:

### **H3: Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**



**Gambar 1:** Kerangka Pemikiran Teoritis

## **MODEL PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, daerah yang dijadikan objek penelitian adalah Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan berupa data Realisasi APBD dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, dan data PDRB Provinsi Sulawesi Utara.

## **ANALISIS DATA**

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 12° – 8' Lintang Selatan dan 116048' – 122036' Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah Barat Selat

Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 20 kabupaten dan 3 kota.

Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki rata-rata untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan per 7 tahun sebesar Rp 269.549.000.000, Dana Alokasi Umum tertinggi sebesar Rp 647.300.000.000 dimiliki oleh Kota Makassar pada tahun 2009, dan Dana Alokasi Umum terendah sebesar Rp 611.000.000 dimiliki oleh Kota Makassar pada tahun 2007. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan per 7 tahun sebesar Rp 41.284.000.000. Pendapatan Asli Daerah tertinggi sebesar Rp 619.593.000.000 dimiliki oleh Kota Makassar pada tahun 2013. Sedangkan Pendapatan Asli

Daerah terendah sebesar Rp 8.853.000.000 dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto pada tahun 2008. Rata-rata variabel Belanja Modal untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan per 7 tahun sebesar Rp 133.849.000.000. Belanja Modal tertinggi sebesar Rp 419.033.000.000 dimiliki oleh

Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2009, sedangkan Belanja Modal terendah sebesar Rp 17.393.000.000 dimiliki oleh Kabupaten Soppeng pada tahun 2010. Untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki rata-rata untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,88%.

**Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif**

	Dana Alokasi Umum (Rp.)	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
<b>Mean</b>	269.549*	41.284*	133.849*	6,88
<b>Maximum</b>	647.300*	619.593*	419.033*	15,39
<b>Minimum</b>	611*	8.853*	17.393*	- 6,62

Keterangan: \*) Dalam jutaan rupiah

#### **Analisis Induktif dengan *Partial Least Square (PLS)***

Dengan menggunakan *Partial Least Square (PLS)*, analisis induktif pada penelitian ini meliputi penelitian goodness of fit model (inner model), yang berfungsi untuk

mengetahui kecocokan suatu model yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian goodness of fit model dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Nilai *goodness of fit model***

APC = 0,298, P<0,001	Good if P<0,05
ARS = 0,161, P=0,006	Good if P<0,05
AVIF=1,166	Good if 5

**Sumber:** Output (data diolah, 2017)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai *Average Path Coefficient (APC)* sebesar 0,298 dengan nilai P< 0,001, hal ini berarti nilai APC signifikan ( P< 0,05). Hal ini membuktikan bahwa variabel endogen dan eksogen memiliki hubungan sebab akibat yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada Tabel 2, nilai *Average R-squared (ARS)* sebesar 0,161 dengan nilai P = 0,006. Nilai

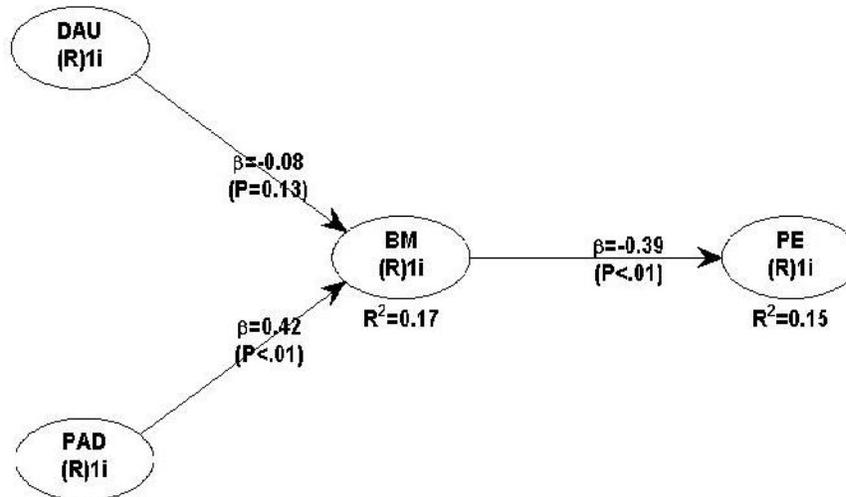
0,161 menunjukkan bahwa variabel pada penelitian ini hanya mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 16,1% dan 83,9% dimiliki oleh variabel lain di luar model. Nilai *Average Variance Inflation Factor (AVIF)* sebesar 1,166 nilainya dibawah angka 5, hal ini membuktikan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis**

**Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Menggunakan Partial Least Square (PLS)**

No	Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	p-Values
1	DAU → BM	-0,08	0,13
2	PAD → BM	0,42	< 0,01*
3	BM → PE	-0,39	< 0,01*

Keterangan: \*) Signifikan karena nilai p-value 5%



**Gambar 2. Hasil Output PLS**

### **Dana Alokasi Umum Berpengaruh Negatif Terhadap Belanja Modal**

Hubungan variabel Dana Alokasi Umum dengan Variabel Belanja Modal pada Tabel 3, menunjukkan nilai p-value sebesar 0,13 yang nilainya lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,005. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Koefisien jalur sebesar -0,08 (bertanda negatif) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang negatif terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak.

Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pengujian H1 bisa saja menunjukkan hasil negatif, karena Dana Alokasi Umum yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan lebih banyak dialokasikan ke Belanja Pegawai bukan ke Belanja Modalnya.

Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan teori keagenan, pihak prinsipal yaitu Pemerintah Pusat percaya terhadap kinerja pihak agen yaitu Pemerintah Daerah dalam hal pengalokasian dana alokasi umum

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Menurut Eisenhardt (1989), sulit bagi pihak prinsipal untuk mengawasi dan memverifikasi apa yang dilakukan agen sudah tepat atau belum. Pemerintah Pusat tidak bisa mengawasi secara langsung Pemerintah Daerah di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dalam pengalokasian dana alokasi umum di masing-masing daerahnya.

### **Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal**

Pada pengujian hipotesis kedua ini nilai P-value sebesar  $<0,01$ , hal ini membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hasil pengujian hipotesis kedua pada Tabel 3 menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,42 (bertanda positif), hal ini berarti variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini diterima, yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat maka dapat mendanai Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana bagi masyarakatnya sehingga Belanja Modalnya juga akan meningkat. Hasil pengujian ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena bidang

pariwisata di provinsi ini sudah mulai berkembang. Selain Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daya tarik wisata tersendiri yang saat ini banyak disenangi oleh para wisatawan, seperti Kabupaten Selayar dan Kabupaten TanahToraja. Banyak wisatawan yang mulai mengunjungi Kabupaten Selayar karena keindahan wisata alamnya. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai Belanja Modalnya tanpa harus mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih mandiri.

Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Selain itu, hasil pengujian H2 ini juga mendukung penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang membuktikan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti juga mendukung kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprizay *et.al* (2014) yaitu jika jumlah pendapatan asli daerah besar maka bisa untuk mendanai belanja modalnya.

### **Belanja Modal Berpengaruh Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil pengujian hipotesis ketiga pada Tabel 3 menunjukkan nilai P-Value  $<0,01$  yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau

0,05. Besarnya nilai P-Value ini membuktikan bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Untuk nilai koefisien jalur pada pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai sebesar -0,39 (negatif). Hal ini berarti bahwa ternyata variabel Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh yang negatif menunjukkan jika Belanja Modal meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan akan tetap rendah. Pengaruh yang negatif ini bisa saja terjadi, karena Pertumbuhan Ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum menyebar. Pengaruh yang negatif ini dapat juga dikarenakan adanya kebocoran maupun penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang digunakan sebagai belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2007) yang menunjukkan bahwa belanja modal yang digunakan untuk pembangunan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini juga didukung oleh hasil analisis deskriptif yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah, yaitu hanya 6,88%.

## **KESIMPULAN**

Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Pengaruh yang negatif ini menunjukkan bahwa Dana

Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Selatan lebih banyak dialokasikan pada Belanja Pegawai daripada Belanja Modalnya. Berdasarkan teori keagenan, pihak prinsipal yaitu Pemerintah Pusat percaya terhadap kinerja pihak agen yaitu Pemerintah Daerah dalam hal pengalokasian dana alokasi umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun menurut Eisenhardt (1989), sulit bagi pihak prinsipal untuk mengawasi dan memverifikasi apa yang dilakukan agen sudah tepat atau belum. Pemerintah Pusat tidak bisa mengawasi secara langsung Pemerintah Daerah di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dalam pengalokasian dana alokasi umum di masing-masing daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena bidang pariwisata di provinsi ini sudah mulai berkembang. Banyak wisatawan yang mulai mengunjungi Kabupaten Selayar karena keindahan wisata alamnya. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai Belanja Modalnya tanpa harus mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih mandiri.

Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh yang negatif ini bisa saja terjadi, karena Pertumbuhan Ekonomi masing-masing

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum menyebar dan dapat juga dikarenakan adanya kebocoran maupun penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang digunakan sebagai belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan PLS, proporsi besarnya path koefisien yang diperoleh masing-masing variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah ternyata nilai koefisien jalur variabel DAU lebih kecil dibandingkan nilai koefisien jalur variabel PAD. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja modal lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap belanja modal Atau dengan kata lain, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU yang diterima dibandingkan dengan PAD daerahnya sendiri. Ini membuktikan adanya *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, P-value hubungan antara variabel Dana Alokasi Umum dengan variabel Belanja Modal menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Sedangkan P-value hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan variabel Belanja Modal menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal tidak mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2006, "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah", Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, Universitas Krtisten Satya Wacana. Salatiga.
- Aprizay, Yudi Satrya, Darwanis, dan Arfan M, 2014. " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh", Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kualla, Volume 3 Nomor 1 Februari 2014 pp. 140-149.
- Darwanto, Yulia Yustikasari, 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Eisenhardt, Kathleen M., 1989, "Agency Theory: An Assessment and Review", *The Academy of Management Review* Vol.14 No.1, 57-74.
- Erlina, Rasdianto, 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Penerbit Brama Ardian
- Fisher, R.C.(1996).*State and Local Public Finance*. Richard D. Irwin, Chicago.

- Hakim, Abdul. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Economica.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S & Schuyley Tilly, 1985, "Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests", *Journal of Urban Economics* 35: 159 – 174.
- Kuncoro, Mudrajat. Ph.D. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga
- Lane, Jan-Erik, 2003, "Management and public organization: The principal-agent framework", University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu, 2000, "Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development ad Cultural Change", Chicago.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera". Simposium Nasional Akuntansi XI, 1-26.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Sidik, Machfud, 2002, "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)", Yogyakarta.
- Stiglitz, Joseph E. 1987. "principal and agent (ii)." *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*. First Edition. Eds. John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman. Palgrave Macmillan.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development*. 9th Edition. New York: Pearson Addison Wesley.
- Wandira, Arbie Gugus, 2013, "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal", *Accounting Analysis Journal*, Februari.